

## PEMBERDAYAAN BUMDES MAJU MAKMUR MELALUI PENDAMPINGAN ADMINISTRATIF UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA MOJOKRAPAK

**Beni Sucipto<sup>1</sup>, Dwi Ermayanti Susilo<sup>2</sup>, Nurianah<sup>3</sup>, Irea Arrahima<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>*Program Studi Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang*

Email: <sup>1</sup>[beni.sucipto@itebisdewantara.ac.id](mailto:beni.sucipto@itebisdewantara.ac.id); <sup>3</sup>[nurianah@itebisdewantara.ac.id](mailto:nurianah@itebisdewantara.ac.id);

<sup>4</sup>[arahima@itebisdewantara.ac.id](mailto:arahima@itebisdewantara.ac.id)

### Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Maju Makmur) melalui pendampingan administratif guna mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Mojokrapak. Permasalahan utama yang dihadapi BUMDes Maju Makmur meliputi rendahnya pemahaman pengelola terhadap administrasi kelembagaan, pencatatan keuangan yang belum tertib, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha desa. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahap identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan intensif dalam penyusunan dokumen administrasi seperti laporan keuangan, buku kas, dan arsip kelembagaan. Selain itu, dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat pemahaman dan implementasi hasil pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengelola BUMDes Maju Makmur dalam menyusun administrasi yang sistematis dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini ditandai dengan tersusunnya dokumen administrasi yang lebih rapi, transparan, dan mudah diakses oleh pihak terkait. Dengan demikian, pendampingan administratif ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola BUMDes Maju Makmur yang profesional dan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan yang dapat direplikasi pada desa lain dengan permasalahan serupa.

Kata kunci: BUMDes Maju Makmur, pemberdayaan, pendampingan administratif, *good governance*, desa Mojokrapak

### 1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu instrumen yang dikembangkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal berbasis potensi desa (Kementerian Desa, 2020; Putra, 2015).

BUMDes hadir sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki desa secara optimal. Melalui pengelolaan yang profesional, BUMDes dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, serta

memberikan pelayanan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan BUMDes menjadi sangat penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa (Sujarweni, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek administratif. Banyak pengelola BUMDes yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait tata kelola administrasi yang baik, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan, pengarsipan dokumen, serta pencatatan kegiatan usaha. Kondisi ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes (Nugroho, 2021).

Permasalahan administratif tersebut berpotensi menghambat perkembangan BUMDes, bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Padahal, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan bagian penting dari konsep *good governance* yang harus diterapkan dalam setiap pengelolaan organisasi, termasuk BUMDes (UNDP, 1997; Dwiyanto, 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam aspek administratif.

Pendampingan administratif menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Melalui kegiatan pendampingan, pengelola BUMDes dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menyusun administrasi yang tertib dan sistematis. Pendampingan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Pemilihan topik pemberdayaan BUMDes Maju Makmur melalui pendampingan administratif ini didasarkan pada urgensi permasalahan yang dihadapi oleh banyak BUMDes, khususnya di Desa Mojokrapak. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum didukung oleh sistem administrasi BUMDes Maju Makmur yang optimal. Hal ini menjadi alasan penting untuk melakukan kegiatan pengabdian yang berfokus pada peningkatan kapasitas administratif pengelola BUMDes Maju Makmur.

Selain itu, topik ini dipilih karena sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes Maju Makmur diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan usaha desa, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Dwiyanto, 2018).

Kegiatan pengabdian ini juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Melalui pelatihan dan pendampingan administratif, pengelola BUMDes Maju Makmur diharapkan mampu mengelola usaha desa secara lebih profesional dan berkelanjutan. Hal ini akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi desa secara keseluruhan (Suharto, 2014).

Manfaat dari penulisan dan pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh pengelola BUMDes Maju Makmur, tetapi juga oleh masyarakat desa secara luas. Dengan tata kelola BUMDes Maju Makmur yang baik, masyarakat dapat memperoleh layanan ekonomi yang lebih transparan dan terpercaya, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi desa.

Secara keseluruhan, kegiatan pemberdayaan BUMDes Maju Makmur melalui pendampingan administratif di Desa Mojokrapak diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi serta menjadi model pengembangan BUMDes Maju Makmur yang berbasis pada prinsip *good governance*. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Maju Makmur) sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu meningkatkan keterlibatan aktif mitra dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga hasil yang dicapai lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, pendekatan partisipatif memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan secara langsung, sehingga pengelola BUMDes Maju Makmur tidak hanya memahami konsep administrasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara mandiri dan berkelanjutan (Chambers, 1994; Mardikanto & Soebiato, 2017).

Pemilihan metode pendampingan administratif didasarkan pada permasalahan utama yang dihadapi BUMDes Maju Makmur di Desa Mojokrapak, yaitu rendahnya kapasitas dalam pengelolaan administrasi kelembagaan dan keuangan. Melalui metode ini, kegiatan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga pada praktik langsung yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mitra. Dengan demikian, metode pendampingan dianggap lebih efektif dibandingkan metode ceramah semata, karena memberikan pengalaman belajar yang aplikatif dan kontekstual (Suharto, 2014).

Teknik pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu sosialisasi, pelatihan, praktik langsung, serta pendampingan intensif. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman awal mengenai pentingnya administrasi BUMDes yang baik dan prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya, pelatihan diberikan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan terkait penyusunan dokumen administrasi seperti buku kas, laporan keuangan sederhana, serta pengarsipan dokumen. Setelah itu, peserta melakukan praktik langsung dengan menyusun administrasi BUMDes Maju Makmur berdasarkan kondisi riil yang mereka hadapi (Widodo, 2018).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahap identifikasi masalah dan kebutuhan mitra melalui observasi dan wawancara dengan pengelola BUMDes Maju Makmur. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal terkait kondisi administrasi yang ada serta menentukan prioritas permasalahan yang perlu ditangani. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam penyusunan materi dan strategi pelaksanaan kegiatan (Sugiyono, 2019).

Tahap berikutnya adalah perencanaan kegiatan, yang meliputi penyusunan modul pelatihan, penyiapan instrumen administrasi, serta penjadwalan kegiatan bersama mitra. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif agar sesuai dengan kondisi dan ketersediaan waktu pengelola BUMDes Maju Makmur. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian, yang meliputi sosialisasi, pelatihan, dan praktik penyusunan administrasi. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan pendampingan secara langsung kepada pengelola BUMDes Maju Makmur dalam menyusun dokumen administrasi yang diperlukan. Pendampingan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar peserta benar-benar memahami setiap proses yang dilakukan (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Selanjutnya, dilakukan tahap pendampingan lanjutan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan implementasi hasil pelatihan. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kemampuan pengelola BUMDes Maju Makmur dalam mengelola administrasi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta memberikan solusi yang tepat.

Tahap akhir adalah evaluasi dan refleksi kegiatan, yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pengabdian. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, baik dari aspek pemahaman maupun keterampilan pengelola BUMDes Maju Makmur dalam menyusun administrasi. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk pengembangan program serupa di masa yang akan datang.

Dengan tahapan metode pelaksanaan yang sistematis dan berbasis pada pendekatan partisipatif, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas administratif pengelola BUMDes Maju Makmur di Desa Mojokrapak. Selain itu, metode ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola BUMDes Maju Makmur yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance* secara berkelanjutan (UNDP, 1997).

### 3. HASIL

Sebelum dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kondisi BUMDes Maju Makmur di Desa Mojokrapak masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek tata kelola administratif. Secara umum, pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam memahami dan menerapkan sistem administrasi yang baik dan benar. Hal ini menyebabkan kegiatan operasional BUMDes belum terdokumentasi secara sistematis.

Dari aspek administrasi keuangan, pencatatan transaksi belum dilakukan secara rutin dan terstruktur. Pengelola BUMDes belum memiliki standar baku dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan masih bersifat sederhana dan belum mencerminkan kondisi keuangan secara akurat. Selain itu, belum tersedia dokumen pendukung seperti buku kas umum, laporan arus kas, maupun laporan laba rugi yang tersusun secara lengkap.

Pada aspek pengarsipan, dokumen kelembagaan seperti struktur organisasi, notulen rapat, serta dokumen kegiatan belum tersimpan dengan baik. Sistem pengarsipan masih bersifat manual dan tidak terorganisir, sehingga menyulitkan dalam proses pencarian data maupun evaluasi kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola administrasi BUMDes masih belum tertib dan belum memenuhi prinsip akuntabilitas.

Selain itu, dari sisi transparansi, penyampaian informasi terkait kegiatan dan keuangan BUMDes kepada masyarakat masih terbatas. Pengelola belum secara rutin menyampaikan laporan kepada pihak terkait, sehingga tingkat keterbukaan informasi masih rendah. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

Dari segi kelembagaan, pembagian tugas dan tanggung jawab antar pengelola belum berjalan secara optimal. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas menyebabkan pelaksanaan tugas seringkali tidak terarah dan bergantung pada inisiatif individu. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan organisasi secara keseluruhan.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah minimnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung administrasi BUMDes. Seluruh proses pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam penyusunan laporan. Kondisi ini juga menghambat efisiensi kerja pengelola BUMDes.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, dapat digambarkan bahwa kondisi awal BUMDes Maju Makmur sebelum pendampingan masih belum mencerminkan tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan administratif yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pengelola serta memperbaiki

sistem administrasi yang ada, sehingga BUMDes dapat berkembang secara profesional dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan administratif BUMDes Maju Makmur di Desa Mojokrapak telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan diawali dengan tahap sosialisasi yang diikuti oleh pengelola BUMDes Maju Makmur dan perangkat desa. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola administrasi yang baik sebagai bagian dari penerapan prinsip *good governance*. Hasil dari kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman awal peserta terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan BUMDes Maju Makmur.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan administratif yang berfokus pada penyusunan dokumen kelembagaan dan keuangan. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali dengan materi terkait pembuatan buku kas umum, laporan keuangan sederhana, serta sistem pengarsipan dokumen yang sistematis. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu memahami konsep dasar administrasi dan mulai mampu menyusun dokumen secara mandiri, meskipun masih memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam beberapa aspek teknis.

Tahap berikutnya adalah praktik langsung dan pendampingan intensif, di mana pengelola BUMDes Maju Makmur didampingi secara langsung dalam menyusun administrasi sesuai dengan kondisi riil yang ada. Pada tahap ini, terjadi peningkatan keterampilan yang signifikan, ditandai dengan tersusunnya dokumen administrasi seperti buku kas, laporan pemasukan dan pengeluaran, serta arsip kegiatan yang lebih rapi dan terstruktur. Selain itu, pengelola juga mulai memahami pentingnya pencatatan transaksi secara rutin dan akurat.

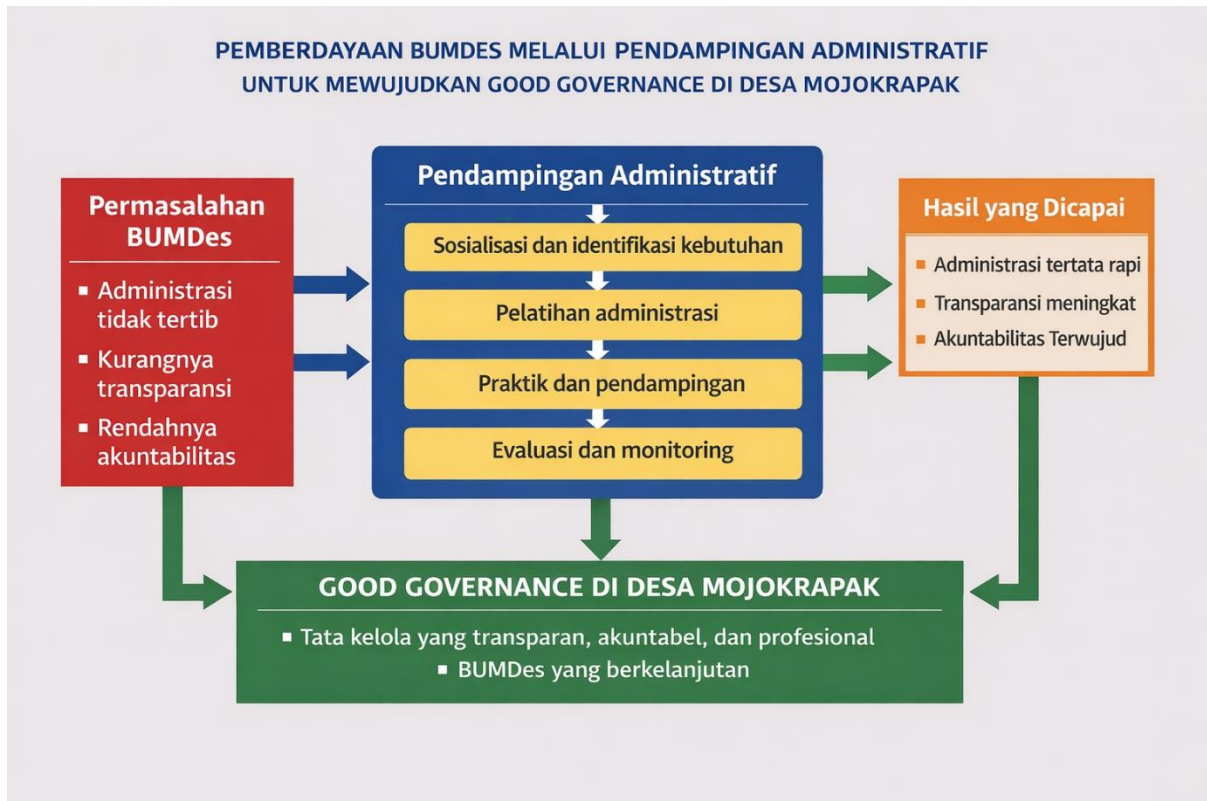
Hasil pendampingan juga menunjukkan adanya perubahan sikap dan komitmen pengelola BUMDes Maju Makmur terhadap pentingnya tata kelola yang baik. Pengelola menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada pihak terkait serta mulai menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini merupakan indikator positif dalam upaya mewujudkan *good governance* di tingkat desa.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kapasitas administratif pengelola BUMDes Maju Makmur. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar administrasi belum terdokumentasi dengan baik, namun setelah pendampingan, dokumen administrasi menjadi lebih lengkap, tertata, dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan bahwa metode pendampingan yang digunakan efektif dalam meningkatkan kemampuan pengelola.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terciptanya sistem kerja yang lebih terorganisir dalam pengelolaan BUMDes Maju Makmur. Pembagian tugas menjadi lebih jelas, alur pencatatan keuangan menjadi lebih sistematis, serta adanya kesadaran untuk melakukan evaluasi secara berkala. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pengelola BUMDes Maju Makmur, tetapi juga oleh pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan BUMDes Maju Makmur.

Dokumentasi kegiatan pengabdian menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan. Foto-foto kegiatan memperlihatkan suasana diskusi yang interaktif, praktik penyusunan administrasi secara langsung, serta proses pendampingan yang dilakukan secara intensif oleh tim pengabdian. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan administratif mampu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes Maju Makmur dalam menerapkan tata kelola yang baik. Dengan adanya peningkatan pemahaman, keterampilan, serta komitmen pengelola, diharapkan BUMDes Maju Makmur di Desa Mojokrapak dapat berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga berpotensi untuk direplikasi di desa lain yang memiliki permasalahan serupa dalam pengelolaan BUMDes Maju Makmur.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengabdian Masyarakat Pemberdayaan BUMDes Maju Makmur Melalui Pendampingan Administratif Untuk Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Mojokrapak**

#### 4. PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Mojokrapak melalui pendampingan administratif BUMDes Maju Makmur memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan. Pendampingan ini difokuskan pada penguatan sistem administrasi sebagai dasar dalam mewujudkan pengelolaan BUMDes Maju Makmur yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting karena administrasi yang tertib menjadi indikator utama dalam mendukung keberlanjutan operasional BUMDes Maju Makmur.

Pada tahap awal, kondisi BUMDes Maju Makmur menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan administrasi, seperti pencatatan keuangan yang belum sistematis, kurangnya dokumentasi kegiatan, serta belum adanya standar operasional dalam pengarsipan dokumen. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan dan efektivitas pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, pendampingan administratif menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pendampingan dilakukan melalui pendekatan praktis yang melibatkan pengelola BUMDes Maju Makmur secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan. Pengelola diberikan pemahaman mengenai konsep dasar administrasi, termasuk pentingnya pencatatan keuangan, penyusunan laporan, dan pengelolaan arsip. Pendekatan ini bertujuan agar pengelola tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan dalam praktik sehari-hari.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan difokuskan pada penyusunan dokumen administrasi secara langsung. Pengelola BUMDes Maju Makmur dilatih untuk membuat buku kas umum, laporan keuangan sederhana, serta dokumen kelembagaan lainnya. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan pendampingan intensif, sehingga pengelola dapat memahami setiap langkah dalam penyusunan administrasi yang baik dan benar.

Selain itu, pendampingan juga menekankan pentingnya konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan. Pengelola didorong untuk melakukan pencatatan transaksi secara rutin dan sistematis, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan proses evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMDes Maju Makmur.

Hasil dari kegiatan pendampingan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengelola dalam menyusun administrasi secara mandiri. Pengelola mulai mampu membuat laporan keuangan sederhana yang mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara jelas. Selain itu, pengarsipan dokumen juga menjadi lebih tertata dan mudah diakses ketika dibutuhkan.

Output lain yang dihasilkan adalah tersusunnya sistem administrasi yang lebih terstruktur pada BUMDes Maju Makmur. Pengelola telah memiliki format baku dalam pencatatan dan pelaporan, sehingga proses administrasi menjadi lebih seragam dan terstandar. Hal ini memudahkan dalam proses pengawasan serta meningkatkan efisiensi kerja organisasi.

Pendampingan ini juga memberikan dampak pada perubahan sikap dan pola kerja pengelola BUMDes Maju Makmur. Pengelola menjadi lebih disiplin dalam menjalankan tugas administratif serta lebih memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan organisasi. Perubahan ini merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik.

Dari sisi implementasi *good governance*, kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif. Transparansi meningkat melalui penyajian laporan yang terbuka, akuntabilitas terwujud melalui pencatatan yang jelas, serta profesionalisme pengelola semakin berkembang. Dengan demikian, BUMDes Maju Makmur mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai lembaga ekonomi desa.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan administratif ini menghasilkan output yang tidak hanya berupa dokumen yang tertata, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan BUMDes Maju Makmur. Dampak jangka panjang dari kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem tata kelola yang berkelanjutan dan dapat dijadikan sebagai model pemberdayaan BUMDes di desa lain.



**Gambar 2. Sosialisasi Persiapan Pendampingan Administratif Kepada Seluruh Anggota BUMDes Maju Makmur Di Desa Mojokrapak**



**Gambar 3. Pelaksanaan Pendampingan Administratif Kepada Seluruh Anggota BUMDes Maju Makmur Di Desa Mojokrapak**

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian di Desa Mojokrapak, dapat disimpulkan bahwa pendampingan administratif BUMDes Maju Makmur mampu meningkatkan kapasitas pengelola dalam menyusun administrasi yang lebih tertib, sistematis, serta sesuai dengan prinsip *good governance*. Kegiatan ini berdampak pada peningkatan pemahaman, keterampilan, serta perubahan sikap pengelola dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga BUMDes Maju Makmur menjadi lebih profesional dan terorganisir.

Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, antara lain durasi pendampingan yang relatif singkat, perbedaan tingkat pemahaman pengelola, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi BUMDes Maju Makmur.

Oleh karena itu, disarankan adanya pendampingan lanjutan dengan waktu yang lebih panjang serta pelatihan berbasis digitalisasi administrasi. Selain itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pengelola dan pemerintah desa dalam menerapkan hasil pendampingan. Kegiatan ini juga berpotensi direplikasi di desa lain sebagai upaya memperkuat tata kelola BUMDes dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan *good governance*.

## 6. REFERENSI

- Chambers, R. (1994). *Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience*. World Development, 22(9), 1253–1268.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra, A. S. (2015). Badan usaha milik desa: Spirit usaha kolektif desa. *Jurnal Ekonomi Desa*, 1(1), 1–10.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Development Programme.
- Widodo, J. (2018). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia.